

# Evaluasi Kinerja Penerapan SMK3 berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012 di PT XYZ

Rizki Cahya Nugraha<sup>1\*</sup>, Muchlison Anis<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Teknik Industri/Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>2</sup>Teknik Industri/Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

\*Email: d600160111 @ums.ac.id

---

## Abstrak

### Keywords:

SMK3, K3, PP  
Nomor 50 Tahun  
2012, Fishbone  
Diagram, Kinerja

*Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 5 ayat 1 – 4, perusahaan wajib menerapkan SMK3 jika perusahaan memiliki pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang, atau mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi. PT XYZ mempekerjakan sebanyak 111 pekerja, oleh sebab itu perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen K3. Tujuan dari penelitian ini salah satunya yaitu untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan SMK3 sebagai tolak ukur perusahaan dalam audit yang akan datang. Metode yang digunakan yaitu in depth interview dan untuk analisis perbaikannya menggunakan fishbone diagram. Hasil kesesuaian pelaksanaan SMK3 dengan PP nomor 50 Tahun 2012 pada tahun 2019 sebesar 78,13% yang berarti belum bisa mencapai nilai memuaskan (85-100%). Usulan perbaikan untuk mengevaluasi ketidaksesuaian beberapa kriteria salah satunya adalah meningkatkan kepedulian dari pemimpin dalam pengawasan untuk bersikap tegas dalam berjalannya program kerja dari unit K3.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Pengoperasian bandar udara yang aman adalah bagian penting dari keselamatan penerbangan. Banyak penelitian tentang penilaian keamanan bandar udara telah dilakukan, seperti penilaian risiko pihak ketiga dan manajemen bandara [1]. Risiko membahayakan tenaga kerja, peralatan, pekerjaan lingkungan, dampak pada daya saing dan kinerja ekonomi industri dan masyarakat [2]. Upaya pengendalian risiko ini di dalam tempat kerja akan diaplikasikan atau diterapkan ke dalam pelaksanaan program K3 yang ada di

tempat kerja [3]. Dalam hal ini, termasuk di dalamnya usaha-usaha untuk pencegahan terjadinya risiko kecelakaan kerja [4]. Kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja tersebut perlu mendapatkan perhatian secara khusus dari pimpinan perusahaan karena kecelakaan yang terjadi akan mengakibatkan kerugian baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan tempat bekerja [5].

Kerugian yang dapat diterima oleh perusahaan yaitu menurunnya kinerja SMK3 di perusahaan tersebut. Proses kepemimpinan K3 ialah salah satu yang

memengaruhi efektivitas SMK3 [6]. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diimplementasikan di perusahaan untuk mencegah cedera dan kesehatan yang buruk di antara para pekerja dan untuk menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat [7]. Hal ini mengarah pada interaksi pekerja dengan mesin atau peralatan yang digunakan, interaksi pekerja dengan lingkungan kerja, dan interaksi pekerja dengan mesin dan lingkungan kerja [8]. Semua SMK3 bertujuan untuk penanganan dan identifikasi risiko K3 yang ada dalam perusahaan agar kejadian yang tidak diinginkan atau dapat mengakibatkan kerugian dapat dicegah [9]. K3 yang dimaksud ialah kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Keselamatan kerja berarti proses merencanakan dan mengendalikan situasi yang berpotensi menimbulkan kecelekaan kerja sedangkan kesehatan kerja adalah kondisi bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan lingkungan kerja termasuk kondisi aman, sehat, dan selamat yang bebas dari resiko kecelakaan maupun kerusakan yang harus diterapkan di perusahaan [10–13]. Saat ini penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melalui SMK3 telah berkembang di berbagai negara baik melalui pedoman maupun standar [14].

Memenuhi persyaratan hukum adalah tanggung jawab utama perusahaan mana pun [15]. PT XYZ menggunakan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 [16] untuk mengukur kinerja penerapan SMK3. Selain Peraturan Pemerintah, ada juga undang-undang yang mengatur tentang K3 seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 [17]. Kinerja yang dimaksud ialah hasil kerja, sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperhatikan, kemampuan kerja, dan unsur-unsur lainnya [18,19]. Pengukuran kinerja ini dapat membantu mencegah cedera ditempat kerja dan penyakit akibat kerja, sulit untuk menentukan kinerja mana yang harus diukur, perusahaan harus secara efektif dan efisien mencegah cedera dan penyakit akibat kerja di tempat kerja [20].

SMK3 ini mengacu pada konsep *Plan Do Check Action* [21] yang dapat dibuktikan dengan cara audit. Audit terdiri dari 2 jenis yaitu audit internal dan audit eksternal [16], penelitian ini berupaya untuk membantu perusahaan mengukur kinerja SMK3 dengan alat audit internal. Audit internal ini membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi [22]. Untuk tingkat penilaian penerapan SMK3 ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 1.** Penilaian Tingkat Penerapan SMK3 dan Penghargaan

Kategori Perusahaan	Tingkat Pencapaian Penerapan		
	0-59%	60-84%	85-100%
Tingkat Awal (64 kriteria)	Kurang, Dapat Dikenai Hukum	,Baik, Sertifikat dan Bendera Perak	Memuaskan, Sertifikat dan Bendera Emas
Tingkat Transisi (122 kriteria)	Kurang, Dapat Dikenai Hukum	Baik, Sertifikat dan Bendera Perak	Memuaskan, Sertifikat dan Bendera Emas
Tingkat Lanjutan (166 kriteria)	Kurang, Dapat Dikenai Hukum	Baik, Sertifikat dan Bendera Perak	Memuaskan, Sertifikat dan Bendera Emas

Sumber: PP Nomor 50 Tahun 2012

Penelitian ini menggunakan indikator audit tingkat awal, namun apabila perusahaan ingin melanjutkan penilaian lebih lanjut lebih baik melakukan penilaian diri secara bertahap [23].

PT XYZ mempekerjakan lebih dari 100 pekerja, oleh sebab itu perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen K3 [16]. Saat ini PT XYZ telah menerapkan Sistem Manajemen K3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Pada audit tahun 2018 terdapat temuan sebanyak 8 kriteria untuk penerapan tingkat awal, dan audit terakhir tahun 2019 bulan Juli terdapat temuan sebanyak 5 kriteria tingkat awal. Maka dari itu perlu diadakannya evaluasi penerapan

SMK3 yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencari tahu sumber masalah yang ditimbulkan dan cara penanganannya agar penerapan SMK3 dapat terlaksana dengan maksimal. Cara untuk mencari tahu sumber masalah dilakukan dengan cara *brainstorming* untuk memacu pemikiran kreatif guna mengumpulkan ide-ide dari suatu kelompok dalam waktu relatif singkat. Kemudian menggunakan diagram ishikawa untuk menemukan penyebab-penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian, dan kesenjangan yang terjadi [24]. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan Sistem Manajemen K3 di PT XYZ.

## 2. METODE

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci [25]. Penelitian kualitatif ini menggunakan desain penelitian studi kasus. Studi kasus ialah uraian atau penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau suatu situasi sosial dan desain studi kasus dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan dan peraturan [26]. Penggunaan jenis penelitian kualitatif dengan desain studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan implementasi sistem manajemen K3 ditinjau dari 10 komponen pedoman penerapan tingkat awal sistem manajemen K3 peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 di XYZ.

Sepuluh komponen pedoman penerapan tingkat awal Sistem Manajemen K3 terdiri dari: (1) Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen, (2) Pembuatan & Pendokumentasian Rencana K3, (3) Perancangan dan Peninjauan Kontrak, (4) Pengendalian Dokumen, (5) Pembelian dan Pengendalian Produk, (6) Keamanan Bekerja berdasarkan SMK3, (7) Standar Pemantauan, (8) Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan, (9) Pengelolaan Material dan

Perpindahannya, dan (10) Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan (16).

Pengambilan data yang dilakukan ialah menggunakan teknik wawancara dan pengisian lembar *checklist*. Wawancara adalah proses komunikasi dipasangkan dengan tujuan serius dan telah ditentukan dirancang untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab [27]. Wawancara terstruktur dilakukan menggunakan pertanyaan yang sesuai dengan pelaksanaan Sistem Manajemen K3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Untuk memperoleh keakuratan data dan kesesuaian hasil wawancara terhadap faktual pengimplementasian di lapangan, maka dilakukan pengamatan di lapangan dan pengecekan dokumen terkait K3 untuk pengisian lembar *checklist*.

Data yang diambil terdiri dari 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah apabila pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap sasaran [28]. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan *officer* dari PT XYZ yang dibuat atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. Data sekunder ialah apabila pengumpulan data yang diinginkan diperoleh dari orang lain atau tempat lain yang bukan dilakukan oleh peneliti sendiri [28]. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari PT XYZ mencakup profil perusahaan, jumlah tenaga kerja, struktur organisasi, proses bisnis perusahaan, dan dokumen yang berhubungan dengan K3.

Setelah melakukan pengambilan data, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, organisasi data, dijadikan satuan yang dapat dikelola, disintesiskannya, dicari, penemuan pola, penemuan apa yang penting, apa yang dipelajari, dan keputusan apa yang dipelajari, dan keputusan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain [29]. Analisis data penelitian kualitatif ini dilakukan dengan model triangulasi Miles dan Huberman. Metode triangulasi data terdapat 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan

verifikasi [30]. Reduksi data disini berarti penyederhanaan, pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstaksian, dan transformasi data mentah di lapangan dalam sebuah mekanis antisipatoris [30,31]. Setelah data diverifikasi dan mendapati kriteria yang tidak sesuai, selanjutnya ialah menganalisis penyebab kriteria tidak sesuai dengan cara *brainstorming* dengan pekerja, setelah mendapatkan faktor-faktor yang memengaruhi kriteria tidak sesuai kemudian dianalisis menggunakan alat *fishbone diagram tools*.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Pengambilan Data

Pada pengambilan data terdapat 3 tahapan yaitu, (1) Tahapan prapengambilan data melakukan koordinasi dengan narasumber terkait tujuan dan prosedur pengambilan data kemudian penentuan waktu dan tempat, lalu menyiapkan alat seperti kamera, alat tulis, daftar pertanyaan, dan *recorder*. (2) Tahapan pengambilan data melakukan wawancara dan *checklist* dengan narasumber menggunakan dasar 64 kriteria PP Nomor 50 Tahun 2012 kemudian melakukan pendokumentasian sebagai bukti penerapan SMK3. (3) Tahapan pascapengambilan data yaitu merapikan data-data maupun catatan dan mendiskusikannya dengan narasumber, kemudian melakukan perbandingan dengan data hasil wawancara untuk memutuskan apakah kriteria-kriteria tersebut sudah sesuai atau belum.

#### 3.2. Analisis Hasil Pengambilan Data

Berdasarkan hasil data wawancara dan *checklist* yang dilakukan dengan unit *Airport Safety, Quality, Risk Management*, berikut merupakan rekapitulasi tingkat kepatuhan setiap elemen berdasarkan hasil audit Sistem Manajemen K3:

**Tabel 2.** Rekapitulasi Audit Sistem Manajemen K3

No	Elemen	Total Kriteria	Hasil Audit	
			Jumlah	Persentase (%)
1	Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen	15	13	86,67
2	Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3	2	1	50
3	Pengendalian, Perancangan, dan Peninjauan Kontrak	2	1	50
4	Pengendalian Dokumen	1	1	100
5	Pembelian dan Pengendalian Produk	3	3	100
6	Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3	21	16	76,19
7	Standar Pemantauan	8	6	75
8	Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan	1	1	100
9	Pengelolaan Material dan Perpindahannya	7	6	85,71
10	Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan	4	2	50
Jumlah		64	50	78,13

No	Elemen	Total Kriteria	Hasil Audit	
			Jumlah	Persentase (%)
1	Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen	15	13	86,67
2	Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3	2	1	50
3	Pengendalian, Perancangan, dan Peninjauan Kontrak	2	1	50
4	Pengendalian Dokumen	1	1	100
5	Pembelian dan Pengendalian Produk	3	3	100
6	Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3	21	16	76,19
7	Standar Pemantauan	8	6	75
8	Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan	1	1	100
9	Pengelolaan Material dan Perpindahannya	7	6	85,71
10	Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan	4	2	50
Jumlah		64	50	78,13

Hasil menunjukkan jumlah kriteria yang sesuai berjumlah 50 butir dengan persentase sebesar 78.13% dan jumlah kriteria tidak sesuai berjumlah 14 butir dengan persentase sebesar 21.88%. Dari 10 elemen tersebut terdapat 3 elemen yang memiliki persentase tidak sesuai yang tinggi sebesar 50% yaitu: elemen Pembangunann dan Pendokumentasian Rencana K3; Pengendalian, Perancangan, dan Peninjauan Kontrak; dan

Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan.

**a. Elemen Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3**

Dalam elemen Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3 terdapat 1 kriteria yang belum sesuai yaitu kriteria 2.4.1 terkait informasi mengenai K3 disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja. Didapatkan kendala dikarenakan informasi mengenai K3 belum sepenuhnya disebarluaskan.

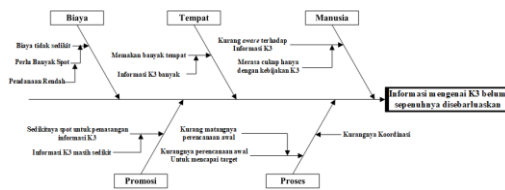
Tabel 4. *Brainstorming* Kriteria 2.4.1

Biaya tidak sedikit	Kurang koordinasi	Informasinya banyak
Banyak tempat	Perencanaan awal	Tempat yang sedikit
Kurang <i>aware</i>		

Dari rekap *brainstorming* diatas dapat dikelompokkan menjadi 5 faktor yaitu:

1. Manusia menjadi faktor utama karena personel kurang *aware* terhadap penyebaran informasi K3.
2. Proses menjadi faktor utama karena kurangnya koordinasi dan kurangnya perencanaan awal.
3. Tempat menjadi faktor utama karena memakan banyak tempat untuk pemasangan informasinya.
4. Promosi menjadi faktor utama karena kurangnya tempat untuk melakukan promosi.
5. Biaya menjadi faktor utama karena dibutuhkan dalam jumlah yang tidak sedikit.

Dari faktor utama diatas dapat dibuat *fishbone diagram* sebagai berikut:



Gambar 2. *Fishbone Diagram* Kriteria 2.4.1

Pada *fishbone diagram* di atas dapat dilakukan pencegahan pada tiap elemen:

1. Manusia, menambahkan informasi terkait K3 secara ringkas dan menarik;

2. Proses, menambahkan informasi di tempat-tempat tertentu dan lebih sering berkoordinasi dengan *officer* dari unit lain mengenai perizinan pemasangan informasi;
3. Tempat, membuat papan informasi K3 yang lebih ringkas dan menarik;
4. Promosi, menambahkan tempat pemasangan papan informasi K3 di beberapa titik;
5. Biaya, menambahkan anggaran untuk penyebarluasan informasi K3.

**b. Elemen Pengendalian, Perancangan, dan Peninjauan Kontrak**

Dalam elemen pengendalian, perancangan, dan peninjauan kontrak terdapat 1 kriteria yang belum sesuai yaitu kriteria 3.2.2 terkait identifikasi bahaya dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas berkompeten. Didapatkan kendala belum diadakannya tinjauan kontrak.

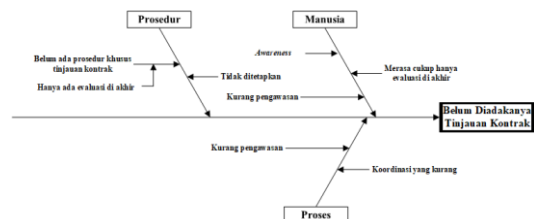
Tabel 5. *Brainstorming* Kriteria 3.2.2

Proses lama	Belum adanya prosedur	Koordinasi yang kurang
Cukup evaluasi	Kurangnya koordinasi	Belum ditetapkan
Kurangnya <i>awareness</i>	Kurang pengawasan	(wajib)

Dari rekap *brainstorming* diatas dapat dikelompokkan menjadi 5 faktor yaitu:

1. Manusia menjadi faktor utama karena kurangnya *awareness* dan merasa cukup hanya dengan evaluasi diakhir.
2. Proses menjadi faktor utama karena kurangnya koordinasi dan kurangnya pengawasan.
3. Prosedur menjadi faktor utama karena belum adanya prosedur khusus dan catatan penerapannya tinjauan kontrak.

Dari faktor utama diatas dapat dibuat *fishbone diagram* sebagai berikut:



Gambar 3. *Fishbone Diagram* Kriteria 3.2.2

Pada *fishbone diagram* di atas dapat dilakukan pencegahan pada tiap elemen:

1. Manusia, introspeksi diri kepedulian dari pemimpin dalam pengawasan untuk bersikap tegas dalam berjalannya program kerja dari unit K3;
2. Proses, ditingkatkannya lagi pengawasan dari unit K3 terhadap vendor yang bekerjasama dengan perusahaan seperti mengawasi atau meminta laporan secara berkala untuk menilai resikonya;
3. Prosedur, membuat prosedur khusus terkait tinjauan kontrak.

### c. Elemen Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

Dalam elemen pengembangan keterampilan dan kemampuan terdapat 2 kriteria yang belum sesuai yaitu kriteria 12.2.1 terkait anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan mencakup kewajiban hukum dan prinsip-prinsip pelaksanaan K3, dan kriteria 12.3.1 terkait pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman.

Tabel 6. *Brainstorming* Kriteria 12.2.1

Belum dibuat kebijakan	Belum diwajibkan	Kurang aware
Kurangnya promosi	Kurang pengawasan pusat	Belum dibuat prosedurnya
Anggarannya sedikit	Kurang SDM ahli	Belum dianggarkan

Dari rekap *brainstorming* diatas dapat dikelompokkan menjadi 5 faktor yaitu:

1. Kebijakan menjadi faktor utama karena belum adanya kebijakan, dan belum diwajibkan.
2. Manusia menjadi faktor utama karena masih kurangnya SDM yang ahli dibidangnya, kurang *aware*, dan kurangnya pengawasan dari pusat.
3. Prosedur menjadi faktor utama karena belum dibuatnya prosedur, disebabkan karena belum diwajibkannya dari pimpinan.
4. Biaya menjadi faktor utama karena anggaran yang sedikit dan belum dianggarkan.
5. Promosi menjadi faktor utama karena kurangnya promosi dari unit K3.

Dari faktor utama diatas dapat dibuat *fishbone diagram* sebagai berikut:



Gambar 4. *Fishbone Diagram* Kriteria 12.2.1

Pada *fishbone diagram* di atas dapat dilakukan pencegahan pada tiap elemen:

1. Kebijakan, membuat kebijakan tertulis agar anggota manajemen eksekutif wajib berperan serta dalam pelatihan mencakup kewajiban hukum dan prinsip-prinsip pelaksanaan K3;
2. Manusia, meningkatkan kepedulian terkait peran aktif anggota manajemen eksekutif, mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan, lebih sering diawasi oleh pimpinan pusat, dan melakukan pelatihan kewajiban hukum dan prinsip-prinsip pelaksanaan K3;
3. Prosedur, mewajibkan kebijakan yang akan dibuat lalu membuat prosedur pelaksanaannya;
4. Biaya, menambahkan anggaran untuk penyesuaian standar hukum pelaksanaan K3 yang berlaku;
5. Promosi, pimpinan melakukan promosi langsung sebagai contoh nyata bahwa pimpinan juga peduli terhadap kewajiban hukum dan prinsip-prinsip pelaksanaan K3.

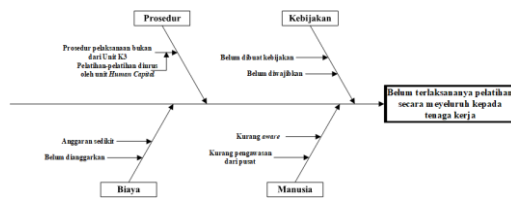
Tabel 7. *Brainstorming* Kriteria 12.3.1

Belum dibuat kebijakan	Belum diwajibkan	Kurang aware
Kurangnya promosi	Kurang pengawasan pusat	Prosedur pelaksanaan bukan dari unit k3
Anggarannya sedikit	Belum dianggarkan	

Dari rekap *brainstorming* diatas dapat dikelompokkan menjadi 5 faktor yaitu:

1. Kebijakan menjadi faktor utama karena belum adanya kebijakan, dan belum diwajibkan.
2. Manusia menjadi faktor utama karena kurang *aware* dan kurang pengawasan dari pusat.

3. Prosedur menjadi faktor utama karena prosedur pelaksanaan bukan dari unit K3, pelatihan-pelatihan diurus oleh unit *human capital*.
4. Biaya menjadi faktor utama karena anggaran sedikit dan belum dianggarkan. Dari faktor utama diatas dapat dibuat *fishbone diagram* sebagai berikut:



Gambar 5. *Fishbone Diagram* Kriteria 12.3.1

Pada *fishbone diagram* di atas dapat dilakukan pencegahan pada tiap elemen:

1. Kebijakan, membuat kebijakan yang diwajibkan untuk melakukan pelatihan secara menyeluruh kepada tenaga kerja;
2. Manusia meningkatkan kepedulian terhadap pelatihan secara menyeluruh kepada tenaga kerja, dan dilakukan pengawasan oleh pimpinan pusat;
3. Prosedur, mengikutsertakan unit K3 dalam pengurusan pelatihan-pelatihan yang berlatarbelakang K3;
4. Biaya, menambahkan anggaran untuk melakukan pelatihan secara menyeluruh kepada tenaga kerja.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang berjudul evaluasi kinerja penerapan SMK3 berdasarkan PP nomor 50 Tahun 2012, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Dari total 64 kriteria, PT XYZ telah melaksanakan sebanyak 50 kriteria atau 78,13% termasuk tingkat penilaian penerapan baik. (2) Ada 14 kriteria yang belum sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012. (3) Dari 14 kriteria, terdapat 4 kriteria yang memiliki persentase sebesar 50% yaitu kriteria 2.4.1, kriteria 3.2.2, kriteria 12.2.1, dan kriteria 12.3.1.

#### REFERENSI

- [1] Ale BJM, Piers M. The assessment and management of third party risk around a major airport. *J Hazard Mater.* 2000;71(1-3):1-16.

- [2] Mohammadfam I, Kamalinia M, Momeni M, Golmohammadi R, Hamidi Y, Soltanian A. Evaluation of the Quality of Occupational Health and Safety Management Systems Based on Key Performance Indicators in Certified Organizations. *Saf Health Work* [Internet]. 2017;8(2):156-61. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.shaw.2016.09.001>
- [3] Astiningsih H, Kurniawan B, Suroto. Hubungan Penerapan Program K3 Terhadap Kepatuhan Penggunaan APD Pada Pekerja Konstruksi Di Pembangunan Gedung Parkir Bandara Ahmad Yani Semarang. *J Kesehatan Masy* [Internet]. 2018 [cited 2019 Sep 12];6(2356-3346):300-8. Available from: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/21431>
- [4] Kania DD, Probo E, Hanifah H. Analisis Faktor Budaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Penanganan Kargo Di Bandara Soekarno Hatta International Airport. *J Manaj Transp Dan Logistik.* 2017;3(1):77.
- [5] Dyahrini W. Analisa Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Pembangunan Rumah Toko (Ruko) Cirebon Di PT Koprime Shandy Sejahtera Kontraktor (KSS). *Univ Widyatama.* 2006;3.
- [6] Skład A. Assessing the impact of processes on the Occupational Safety and Health Management System's effectiveness using the fuzzy cognitive maps approach. *Saf Sci.* 2019;117(November 2018):71-80.
- [7] ISO 45001. Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use. 2018.
- [8] Darmastuti I. Pelaksanaan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Karyawan Pt. Bitratex Industries Semarang. *J Stud Manaj Organ.* 2010;7(1):37-60.

- [9] Ridley J. Health and Safety in Brief. Butterworth-Heinemann Impr Elsevier. 2008;4:37–9.
- [10] Pemerintah Indonesia. Permenaker 5 Tahun 2018. 2018;
- [11] Hadiguna RA. Manajemen Pabrik: Pendekatan Sistem Untuk Efisiensi dan Efektivitas. Jakarta: Bumi Aksara; 2009.
- [12] Mangkunegara AP. Manajemen Sumber Daya Manusia. Vol. 9, Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. 2001. p. 952–62.
- [13] Anis M, Wijaya GG, Muslimah E. Implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Industri Batik (Studi Kasus di Industri Batik “GT” Laweyan Surakarta. Semin Nas IENACO. 2015;(ISSN 2337-4349):1–9.
- [14] Novianti S, Lubis HS, Tarigan L. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja Di Threat And Ship Operations-Facility Operations PT Chevron Pacific Indonesia Duri. J Univ Sumatera Utara. 2012;1(13):1–10.
- [15] Salguero-Caparrós F, Pardo-Ferreira MC, Martínez-Rojas M, Rubio-Romero JC. Management of legal compliance in occupational health and safety. A literature review. Saf Sci [Internet]. 2020;121(August 2019):111–8. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2019.08.033>
- [16] Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. 2012;1–16.
- [17] Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Jakarta Sekr Negara. 1970;1970(5):unpaginated.
- [18] Faisal MA. Memahami Evaluasi Kinerja Karyawan. Bogor: Mitra Wacana Media; 2015.
- [19] Nawawi H. Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan. Gadjah Mada University Press. 2006.
- [20] Snook J. Three Indicators to Measure Safety Performance [Internet]. <https://gocontractor.com/blog/three-indicators-to-measure-safety-performance/>. 2016. Available from: <https://gocontractor.com/blog/three-indicators-to-measure-safety-performance/>
- [21] ISO 9001. Quality management systems – Requirements. 2015;
- [22] Selim G, David M. Risk management and internal auditing: what are the essential building blocks for a successful paradigm change? Int J Audit [Internet]. 1999 [cited 2019 Nov 6];3:147–55. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1099-1123.00055>
- [23] Tarwaka. Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Manajemen dan Implementasi. Surakarta: Harapan Press; 2008.
- [24] Nasution MN. Manajemen Mutu Terpadu. Bogor: Ghalia Indonesia; 2015.
- [25] Sugiarto. Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif. Skripsi & Tesis. Tangerang: Matana Publishing; 2015.
- [26] Mulyana D. Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: PT Rosdakarya; 2006.
- [27] Charles JS. Interviu: Prinsip dan Praktik. Jakarta: Salemba Humanika; 2012.
- [28] Budiarto E. Biostatistika untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat. Jakarta: EGC; 2002.
- [29] Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta; 2007.
- [30] Miles MB, Huberman AM. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press; 1992.
- [31] Moleong LJ. Metodologi Penelitian Kualitatif (Pertama). Penerbit PT Remaja; 2009. 1–31 p.
- [32] Mori K, Kameda T, Kobayashi Y. Status of occupational health elements in occupational safety and health



- management systems in Japan. *Int Congr Ser.* 2006;1294:35–8.
- [33] Gasperz V. *Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa.* Jakarta: PT Gramedia; 1997.
- [34] Alijoyo, Antonius, Bourma E, Sutawinangun N, Doddy M. *Review of Governance in Asia: Corporate Governance in Indonesia.* Forum Corp Gov Indones. 2004;
- [35] Suardi R. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.* Jakarta: PPM Lembaga Manajemen; 2007.
- [36] Pemerintah Indonesia. *Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).* 2015;IV(139):1–73.
- [37] Pemerintah Indonesia. *Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.* 2009;
- [38] Nuryanta N. *Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Tinjauan Aspek Rekrutmen dan Seleksi).* *el-Tarbawi.* 2008;1(1):55–69.